

Persepsi Masyarakat Mengenai Perkembangan Demokrasi Semasa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo di Indonesia

Amida Hanna¹, Maswadi Rauf², Ramlan Siregar³, Massa Djafar⁴

^{1,2,3,4} Sekolah Pascasarjana, Program Studi Doktorat Ilmu Politik, Universitas Nasional, Indonesia

E-mail: amidahanna56@gmail.com¹, mailto:maswadirauf@yahoo.com², ramlansiregar@gmail.com³, tbmassajafar95@gmail.com⁴

Abstrak

Penelitian ini dilandasi adanya perdebatan panjang mengenai baik buruknya perkembangan demokrasi di Indonesia dari satu era kepresidenan menuju era lainnya, serta anggapan umum bahwa kepemimpinan berlatar belakang militer akan lebih otoriter dibanding yang berlatar belakang sipil. Melalui pendekatan kuantitatif yang dijelaskan dengan kajian kualitatif, penelitian ini mengukur persepsi masyarakat Indonesia terhadap praktik demokrasi, kepemimpinan dan kebijakan publik dalam penegakan demokrasi di Indonesia. Pengukuran dilakukan dengan membandingkan ketiga variabel tersebut pada era presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo (JKW) di periode pertama kepemimpinan mereka. Ditemukan beberapa perbedaan persepsi masyarakat terhadap praktik demokrasi di kedua era tersebut, dimana persepsi terkait praktik demokrasi, kebijakan publik dan gaya kepemimpinan di era Presiden SBY dirasakan lebih baik dibandingkan era JKW, berbeda dari stigma otoriter penguasa militer. Penelitian juga membuktikan bahwa terdapat pengaruh antara gaya kepemimpinan yang dimoderasi oleh variabel kebijakan publik terhadap pembentukan persepsi masyarakat terkait praktik demokrasi.

Kata Kunci: *Demokrasi, Gaya Kepemimpinan, Kebijakan Publik, Hak Asasi Manusia.*

Abstract

This research is based on supporting good military development for the development of democracy in Indonesia from one era of the presidency to another, as well as the general assumption that leadership with a civilian background will be more authoritarian. Through a quantitative approach that is explained by a qualitative study, this study measures the perceptions of the Indonesian people towards the practice of democracy, leadership and public policy in the enforcement of democracy in Indonesia. The measurement is done by comparing the three variables in the era of President Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) and Joko Widodo (JKW) in their first leadership period. There were several differences in public perceptions of democracy in the second era, where perceptions related to democratic practices, public policies and leadership styles in the SBY era were perceived as better than the JKW era, different from the stigma of the military rulers. The research also proves that there is an influence between leadership style which is moderated by public policy variables on the formation of society related to democracy.

Keywords : *Democracy, Leadership Style, Public Policy, Human Rights.*

PENDAHULUAN

Perjalanan demokrasi di Indonesia, dengan cakupan wilayah yang sangat luas dan jumlah penduduk yang besar (mencapai 267 juta jiwa pada 2019) tidak memungkinkan terjadinya keterlibatan penduduk secara langsung dalam setiap kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, sistem demokrasi langsung tidak lagi relevan dan dibentuk Dewan Perwakilan

Rakyat (DPR), yang menjadi , Lektor Kepala Perpanjangan tangan aspirasi rakyat. Pada situasi ini muncul istilah demokrasi perwakilan atau demokrasi tidak langsung. Di sepanjang sejarah, demokrasi Indonesia pernah menerapkan sistem demokrasi yang berbeda. “Demokrasi Terpimpin” pernah diterapkan pada era pemerintahan Soekarno, sedangkan “Demokrasi Pancasila” diusung pada masa pemerintahan Soeharto. Hingga era Reformasi, negara kita masih menganut demokrasi yang didasarkan pada prinsip-prinsip Pancasila.

Demokrasi merupakan sebuah sistem pengelolaan negara yang diyakini sebagai sistem politik terbaik yang dikenal dewasa ini (Giddens, 1999). Lihat juga Jacques Demoida (Democracy to Come, 2010) yang menunjukkan demokrasi sebagai model pengelolaan yang ideal. Meskipun baru sebagian negara di dunia menerapkan demokrasi, semakin lama semakin banyak negara yang mendeklarasikan diri sebagai negara demokratis, termasuk yang berpenduduk mayoritas Muslim. Keadaan itulah yang membuat Fukuyama (1992) sangat bersemangat dalam melihat masa depan demokrasi, dan menyatakan, “... *the end point of mankind’s ideological evolution and the universalization of western liberal democracy as the final form of human government*” (Diamond, 1999; Sorensen, 2003).

Sementara itu, bagi mereka yang sudah menerapkannya, tidak semua menerapkan secara sungguh-sungguh. Di antara yang sudah menerapkannya, tidak sedikit yang gagal. Woodrow Wilson mengingatkan bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang paling sulit (Esposito, Sonn, & Voll, 2016). Lebih dari itu, tidak ada model tunggal demokrasi, bahkan jika merujuk pada negara-negara yang sudah mapan dan sudah teruji oleh waktu serta sukses menjalankannya (Sartori, 1962). Karena itu, Sorensen (2003) menyebut demokrasi tidak akan turun dari langit, demokrasi memerlukan perjuangan.

Pada masa Reformasi, Indonesia mulai mengarah pada arti demokrasi sebenarnya karena sudah dapat melangsungkan pemilihan presiden, anggota legislatif, dan kepala daerah secara langsung. Perubahan status wilayah dan pemekaran daerah juga diizinkan oleh pemerintah pusat untuk menjawab segala keinginan dan aspirasi rakyat. Lalu apakah indikator ini sudah membuat demokrasi di Indonesia bisa dijalankan sepenuhnya? Kemudian, apa sebenarnya yang menentukan keberhasilan atau kegagalan dalam mengimplementasikan demokrasi? Sampai saat ini pertanyaan itu masih menjadi bahan kajian walaupun secara umum ada sejumlah kriteria yang sudah disepakati ilmuwan politik untuk menyebut sebuah negara sudah sukses dalam mengimplementasikan demokrasi. Para ilmuwan mengakui bahwa pada hakikatnya setiap negara adalah unik karena sangat dipengaruhi oleh aspek sejarah, budaya, sosial, ekonomi, serta nilai-nilai keyakinan yang dianut masyarakatnya.

Membandingkan dua era demokrasi.

Perdebatan yang sering dilakukan adalah bagaimana masyarakat menilai baik buruk kebijakan yang diambil dalam suatu era pemerintahan jika dikaitkan dengan pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Selain itu, dalam berbagai era kepemimpinan seringkali gaya memerintah seorang pemimpin sangat mewarnai wujud demokrasi yang diselenggarakan pada masanya sehingga pada akhirnya mempengaruhi persepsi masyarakat apakah pada era itu demokrasi ditegakkan atau tidak. Masalah ini dirangkum menjadi empat pertanyaan penelitian berikut:

Pertama berkaitan dengan perbedaan penilaian atas dan/atau persepsi mengenai kebijakan yang diambil pemerintah pada suatu era kepemimpinan, yang sering kali menimbulkan pro dan kontra terhadap penegakan demokrasi di Indonesia. Permasalahan kedua, apakah masyarakat mempunyai persepsi dalam menilai gaya kepemimpinan seorang presiden ketika mengaitkannya dengan kemampuan demokrasi untuk berlangsung sepenuhnya. Permasalahan ketiga mengenai persepsi masyarakat tentang fakta yang berkaitan dengan prinsip demokrasi yang dijalankan pada dua masa yang berbeda tentu mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing.

Sebagian masyarakat persepsi bahwa era demokrasi pada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) lebih baik, begitu pun sebaliknya, sebagian lain merasa era demokrasi Presiden Joko Widodo (JKW) yang lebih baik. Sangat mungkin terdapat pendapat pro dan kontra di kedua era itu, mengenai penerapan prinsip kebebasan sipil dan politis terkait kebebasan berpendapat dan berkumpul, kebebasan dalam berkeyakinan, bebas dari

diskriminasi dan adanya pers yang independen tanpa intervensi pemerintah. Tidak jarang perubahan era kepemimpinan suatu negara di bawah seorang presiden disertai dengan perubahan kondisi politis dan hal lainnya seperti perbedaan persepsi masyarakat tentang penegakan demokrasi. Walaupun demikian, terdapat masalah yang tidak kunjung selesai selama kedua era, seperti penerapan dan penyelesaian kasus hak asasi manusia (HAM).

Berangkat dari beberapa masalah tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis beberapa fokus pembahasan melalui pertanyaan berikut:

Pertama berkaitan dengan perbedaan penilaian atas dan/atau persepsi mengenai kebijakan yang diambil pemerintah pada suatu era kepemimpinan, dengan segala pro dan kontra-nya terhadap penegakan demokrasi di Indonesia.

1. Bagaimana perbedaan persepsi masyarakat terhadap gaya kepemimpinan SBY dan JKW dari sudut pandang demokrasi?

Pertanyaan kedua mengenai persepsi masyarakat tentang fakta yang berkaitan dengan prinsip demokrasi yang dijalankan pada dua masa yang berbeda, dengan segala kekurangan dan kelebihan masing-masing.

2. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah pada masa SBY dan JKW dari sudut pandang demokrasi?

Pertanyaan ketiga, bagaimana masyarakat menilai gaya kepemimpinan seorang presiden ketika mengaitkannya dengan kemampuan penyelenggaraan demokrasi.

3. Bagaimana masyarakat mempersepsikan kondisi ideal iklim demokrasi pada gaya kepemimpinan kedua presiden?

Pertanyaan keempat menyangkut asumsi yang mendasari ketiga pertanyaan diatas, bahwa persepsi masyarakat mengenai penerapan prinsip kebebasan sipil dan politis terkait kebebasan berpendapat dan berkumpul dipengaruhi oleh ciri-ciri kepemimpinan seorang presiden.

4. Apakah gaya kepemimpinan seorang presiden dan kebijakan publik pemerintahannya punya pengaruh terhadap pembentukan persepsi masyarakat mengenai kualitas demokrasi?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dirancang dengan berdasar pada paradigma post positivisme (post-modern). Sebagian orang menyatakan paradigma (paradigm) sebagai intelektual komitmen, yaitu suatu citra fundamental dari pokok permasalahan dari suatu ilmu. Paradigma post-positivisme melakukan penelitian dengan melakukan pendekatan secara natural untuk dapat lebih dekat dengan obyek yang diteliti. Post-positivisme merupakan aliran yang ingin memperbaiki kelemahan-kelemahan paradigma positivisme yang hanya mengandalkan kemampuan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti. Dengan dasar tersebut penelitian ini menggabungkan pendekatan kuantitatif yang mengambil data langsung dari masyarakat dengan kajian kualitatif yang dapat menjelaskan gejala yang diamati. Penelitian ini mengukur persepsi masyarakat Indonesia terhadap praktik demokrasi, kepemimpinan dan kebijakan publik dalam penegakan demokrasi di Indonesia dengan membandingkan ketiga variabel tersebut di era presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo (JKW) di periode pertama kepemimpinan mereka. Ini menggunakan hipotesis bahwa terdapat pengaruh antara gaya kepemimpinan seorang presiden dengan praktek demokrasi di era-nya (H1), yang bisa saja tidak terbukti (H0) bila data tidak menunjukkan perbedaan diantara kedua era kepresidenan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan metode survei terhadap 500 responden penelitian yang tersebar dari beberapa daerah di Indonesia. Peneliti juga menambahkan wawancara sebagai data penguat secara kualitatif dari berbagai sumber yang berkaitan dengan penegakan demokrasi di Indonesia. Sementara itu, data sekunder yang digunakan peneliti melakukan analisis terhadap dokumen terkait dari lembaga yang berkaitan dengan penerapan dimensi / prinsip demokrasi seperti lembaga Hak Asasi, Lembaga Hukum dan Politik, serta lembaga lainnya (non-pemerintahan). Menurut Neuman (1997) dalam data kualitatif yang digunakan (wawancara) para peneliti mengetahui sifat value-

laden (sarat nilai-nilai subyektif si peneliti) dalam penelitian, dan si peneliti pun secara aktif melaporkan nilai-nilai dan bias-biasnya, serta nilai-nilai dari informasi yang dikumpulkan di lapangan.

Untuk kebutuhan data kualitatif melalui wawancara terbuka, narasumber penelitian berjumlah enam orang yang berasal dari akademisi, jurnalis dan politisi. Adapun konsep pengukuran yang dilakukan baik dalam data kuantitatif dan kualitatif terkait dengan persepsi terhadap kebijakan publik, gaya kepemimpinan dan praktik demokrasi di kedua era presiden. Kebijakan publik diukur melalui dua dimensi yaitu penerapan kebijakan substantif dan kebijakan kelembagaan. Gaya kepemimpinan diukur melalui dua dimensi yaitu kepemimpinan yang bersifat otoriter dan kepemimpinan demokratis. Sementara praktik demokrasi diukur dengan melihat dimensi keterlibatan Lembaga negara dalam menegakan prinsip demokrasi, kebebasan sipil dan politik, dan dimensi partisipasi politik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Pemerintah Pada Era SBY dan JKW

Hasil jawaban dari survei 500 responden dikelompokkan ke dalam tiga kategori untuk menggambarkan persepsi mengenai kondisi kebijakan publik pada dua era kepresidenan SBY dan JKW. Selanjutnya, peneliti akan melihat persepsi responden dengan membandingkan kondisi kebijakan publik yang terjadi pada kedua era presiden itu. Adapun kategori penilaian itu adalah sebagai berikut: Baik, Biasa saja, dan Kurang Baik.

Tabel 1. Persepsi Terhadap Kebijakan Publik SBY dan JKW

Persepsi	SBY		Jokowi	
	Jumlah	%	Jumlah	%
Kurang Baik	46	9.2	102	20.4
Biasa Saja	295	59.0	263	52.6
Baik	159	31.8	135	27.0

Sumber: olah data penelitian terhadap 500 responden menggunakan SPSS 22

Berdasarkan tabel 1, secara deskriptif tidak terlalu jauh atau tinggi perbedaan persepsi baik/buruk kebijakan publik pada dua era kepemimpinan. Pada setiap era SBY dan JKW responden sebagian besar merasa bahwa tidak ada yang spesial (biasa saja) dengan kebijakan publik SBY (59%) dan JKW (52,5%). Namun, berdasarkan persentase responden yang merasakan kebijakan publik kepada dua era itu (SBY dan JKW), kepuasan responden lebih tinggi terhadap kebijakan publik SBY dibandingkan kebijakan publik yang diambil pada era kepemimpinan JKW. Hal ini terlihat dari besar persentase responden yang menilai kebijakan publik SBY baik dibandingkan persentase penilaian terhadap JKW yaitu 31,8% berbanding 27%. Begitu pun sebaliknya, persentase responden yang menilai kurang baik terhadap kebijakan publik era SBY juga lebih rendah dibandingkan penilaian terhadap JKW yaitu 9,2% berbanding 20,4%.

Untuk melihat perbedaan lebih jauh secara statistik, peneliti menggunakan analisis uji beda rata-rata (mean difference) pada data hasil penelitian. Berikut ini adalah hasil uji rata-rata yang didapat terkait persepsi terhadap kebijakan publik pada kedua era kepresidenan.

Tabel 2. Uji Beda Rata-rata Persepsi Kebijakan Publik SBY dan JKW

	Paired Samples Statistics		Paired Samples Test	
	Mean	Std. Deviasi	t	Sig.
Kebijakan Publik SBY	23,37	5.566	4,160	0,000
Kebijakan Publik JKW	21,69	6,378		

Sumber: olah data penelitian terhadap 500 responden menggunakan SPSS 22

Berdasarkan nilai signifikansi uji rata-rata yang bernilai 0,000 yang berarti $\leq 0,05$, H1 diterima yang berarti terdapat perbedaan rata-rata persepsi responden terhadap kebijakan publik era SBY dan JKW. Hal ini berarti terdapat persepsi mengenai kebijakan publik yang

lebih baik yang dirasakan masyarakat di antara dua era kepemimpinan itu. Jika dilihat dari nilai rata-rata dari jawaban responden penelitian dimana rata-rata jawaban responden penelitian tentang kebijakan publik era SBY yang sebesar 23,37 dan era JKW yang bernilai 21,69 dapat disimpulkan responden penelitian mempersepsikan kebijakan publik yang lebih baik yang dilakukan SBY dibandingkan yang dilakukan oleh JKW. Berdasarkan uraian hasil jawaban narasumber dari kalangan akademisi, jurnalis dan politisi terkait opini mereka terhadap kebijakan publik era SBY dan JKW terdapat beberapa hal penting yang dapat digaribawahi kebijakan publik pada dua era kepemimpinan SBY maupun JKW.

Pertama adalah polemik kebijakan publik substantif penegakan HAM yang terkait tenaga kerja. Semua narasumber menyatakan bahwa kesempatan lapangan pekerjaan merupakan masalah yang sangat problematis pada tiap kepemimpinan presiden, termasuk pada periode pertama kepemimpinan SBY dan JKW. Permasalahan ini merupakan satu hal yang menggambarkan bahwa secara tidak disadari pada dua era presiden HAM bagi masyarakat masih belum dipenuhi seutuhnya di Indonesia yaitu hak dasar mencari pekerjaan untuk kehidupan yang lebih baik (Narasumber 1, 2, 3, 4, 5, 6). Lebih lanjut, permasalahan tenaga kerja juga harus dinilai dari banyaknya perbedaan variabel, seperti jumlah ketersediaan tenaga kerja dan kondisi lingkungan negara. Beberapa narasumber menggaribawahi bahwa permasalahan tenaga kerja ini jauh lebih sulit dihadapi pada era JKW dengan kendala utama yaitu anggaran terbatas dan pertumbuhan ekonomi yang sulit (Narasumber 1, 2, 3, 6). Dari data masalah tenaga kerja, pada tahun 2018 melalui data BPS, tingkat pengangguran terendah terjadi, dimana ini adalah pada era kepemimpinan JKW, salah satu stimulus pemicunya adalah berkembang dengan pesatnya digital dan marketplace yang memberi kemudahan bagi masyarakat khususnya UMKM dalam mengembangkan usahanya (Narasumber 4, 5).

Berbagai upaya pun dilakukan agar memberikan kesempatan luas bagi lapangan kerja. Perlu dicatat bahwa sebelum era JKW terjadi banyak pabrik atau perusahaan yang tutup akibat regulasi yang memberatkan. Narasumber menyebutkan UU Cipta Kerja akan menjadi solusi untuk masalah tersebut, Oleh karena itu Presiden JKW melihat upah tenaga kerja di Indonesia bisa dikatakan termahal dibandingkan negara tetangga, yang disebut sebagai alasan perusahaan internasional keluar dari Indonesia (Narasumber 5, 6). Kedua adalah upaya pemerintah membuat kebijakan publik untuk memberi jaminan kesejahteraan sosial. Terkait hal ini, terdapat perbedaan yang jelas yang dilakukan dua era pemerintahan baik SBY dan JKW. Perbedaannya terletak pada pengambilan keputusan mengenai BLT atau Bansos, dimana pada zaman SBY ditujukan sebagai usaha menekan kemiskinan sedangkan pada era JKW lebih kepada bantuan sosial dalam hal penanganan bencana seperti pandemi (Narasumber 1, 2, 3, 4, 5). Selain itu, dapat dikatakan BULAT atau Bansos Pada era SBY merupakan kebijakan situasional, berbeda dengan era JKW dimana hal ini dijadikan kebijakan tiap tahun karena sesuai misi visi beliau, uang rakyat untuk rakyat (Narasumber 5), dari sisi sasaran JKW lebih dianggap tepat sasaran karena mekanisme yang digunakan (kartu) sehingga mengurangi risiko untuk digunakan dalam bentuk lain (Narasumber 3, 4, 6). Namun, catatan penting yang perlu diperhatikan kebijakan pemerintah terkait kesejahteraan sosial ini baik era SBY dan JKW adalah regulasi penyaluran maupun siapa yang berhak menerima bantuan-bantuan itu. Sering kali dan masih ada keluhan dari masyarakat soal bantuan tidak tepat sasaran maupun bantuan yang dikorupsi (Narasumber 4).

Ketiga adalah kebijakan dalam upaya menyelesaikan pelanggaran HAM terhadap warga negara. Pada kedua era baru pada era SBY dan JKW, penegakan masalah HAM memiliki beberapa isu dimana ada kondisi tertentu dapat ditangani baik, dan ada juga atau banyak yang kurang memuaskan (Narasumber 1, 2, 4, 6). Lebih jauh narasumber juga memandang dalam hal penegakan HAM, kedua presiden memainkan perannya dengan kehati-hatian karena terkait kepentingan politik mereka juga. Kepentingan politik menyimpulkan keputusan yang diambil, tergantung perspektif kebijakan pada kedua presiden (Narasumber 1, 6).

Selain itu, terdapat beberapa catatan soal penyelesaian pelanggaran HAM berat dimana tidak pernah sampai di pengadilan HAM baik pada zaman SBY maupun JKW. Pelanggaran

HAM berat pada era SBY seperti penghapusan komisi rekonsiliasi nasional sehingga upaya untuk mengungkap pelanggaran HAM itu tidak muncul dan pada era presiden JKW diakui juga tidak ada perkembangan berarti (Narasumber 1, 2). Namun, jika disimpulkan, sebenarnya HAM sama-sama ditegakkan pada kedua era, tapi memang penegakan hukumnya tidak optimal. "Penegakan itu komitmen presidennya ada cuma mungkin komitmen JKW lebih besar sedikit dibandingkan SBY" (Narasumber 3). Selain itu, pada era SBY dan JKW, perbedaan kebijakan menegakkan HAM terletak pada pendekatan penanganan konflik yang digunakan kedua pemerintah. Pemerintahan JKW dikatakan lebih tegas dengan menggunakan hukum dan keamanan. Di pihak lain, pemerintah era SBY lebih mengemukakan dialog jika ada konflik-konflik dalam masyarakat. Hal inilah, yang menjadi alasan utama opini dalam masyarakat potensi pelanggaran HAM lebih besar pada era JKW dibandingkan SBY (Narasumber 4). Keempat terkait dengan kebijakan yang diambil kedua era presiden dalam mendorong kinerja kelembagaan dalam menegakkan demokrasi. Kebijakan kelembagaan ini cukup sulit untuk dibandingkan karena instrumennya penilaian sangat luas dan beda-beda, artinya kondisinya yang berbeda membawa dinamika yang berbeda pula (Narasumber 1, 3, 4). Namun, jika diberikan penilaian terkait persepsi publik kebijakan kelembagaan dalam berdemokrasi, pemerintahan JKW memang lebih rendah (Narasumber 3), ketiga lembaga utama (legislatif, eksekutif dan yudikatif) lebih dinamis pada masa pemerintahan SBY (Narasumber 4).

Namun, secara keseluruhan, kebijakan kedua presiden masih punya komitmen yang sama memuaskan para responden; yang menjadi masalahnya adalah eksekusi kebijakan. Di periode pertama SBY, SBY masih melihat berpikir dua kali untuk bertindak sementara JKW menyerahkan semuanya itu ke stafnya (Narasumber 3). Hampir selalu ada perbedaan pendapat pada saat di satu dua lembaga dalam menetapkan sebuah kebijakan pada di era SBY. Akibatnya, tiap lembaga dapat mengganggu lembaga lainnya sehingga dapat menghambat regulasi yang sebenarnya butuh disahkan dengan cepat (Narasumber 4). Sebaliknya, pada era JKW, ketiga lembaga negara dapat dikatakan lebih kompak dalam mengeluarkan kebijakan. Oleh sebab itu, relatif tidak ada gonjang-ganjing atau kehebohan bila ada keputusan, regulasi, atau peraturan baru. Tidak ada saling ganggu antara lembaga itu, yang juga menggambarkan tidak ada kompetisi. Bukan berarti pemerintahan JKW tidak demokratis, hanya saja setiap presiden punya tantangan dan masalahnya masing-masing (Narasumber 4, 6).

Tetapi jika dilihat lebih jauh, hal ini dapat dikatakan sebagai realitas dari sistem multipartai dimana ada saatnya saling menguatkan sekaligus melemahkan eksekutif dari sisi ketika mau mengambil keputusan. Melemahkan karena presiden terkungkung dalam partai yang berafiliasi, sedangkan menguntungkan karena Presiden dapat dihadapkan pada banyak pilihan partai dalam persoalan mencari dukungan politis (Narasumber 6).

Persepsi Masyarakat Terhadap Gaya Kepemimpinan Pada Era SBY dan JKW

Berdasarkan hasil jawaban 500 responden, peneliti juga melihat perbandingan persepsi responden mengenai gaya kepemimpinan yang ditampilkan pada kedua era presiden. Adapun kategori penilaian itu adalah sebagai berikut: Demokratis, Biasa saja, dan Kurang Demokratis.

Tabel 3. Persepsi Terhadap Gaya Kepemimpinan SBY dan JKW

Persepsi	SBY		JKW	
	Jumlah	%	Jumlah	%
Kurang Demokratis	26	5,2	91	18,2
Biasa Saja	267	53,4	235	47,0
Demokratis	207	41,4	174	34,8

Sumber: olah data penelitian terhadap 500 responden menggunakan SPSS 22

Berdasarkan tabel.3, secara deskriptif tidak terlalu jauh atau tinggi perbedaan persepsi tentang demokratis atau tidaknya era kepemimpinan SBY dan JKW. Pada setiap era, SBY dan JKW responden sebagian besar merasa bahwa tidak dapat dinilai atau dipastikan

demokratis atau tidak demokratis (biasa saja) dengan gaya kepemimpinan yang ditunjukkan SBY (53,4%) dan JKW (47%). Namun, berdasarkan persentase yang lebih besar, responden lebih banyak mempersepsikan gaya kepemimpinan yang demokratis lebih cenderung kepada SBY dibandingkan kepemimpinan JKW. Hal ini terlihat dari lebih besarnya persentase responden yang menilai SBY demokratis dibandingkan besaran persentase penilaian terhadap JKW yaitu 41,4% berbanding 38,4%. Begitu pun sebaliknya, persentase responden yang menilai kurang demokratis terhadap gaya kepemimpinan SBY juga lebih rendah dibandingkan penilaian terhadap JKW yaitu 5,2% berbanding 18,2%.

Untuk melihat perbedaan lebih jauh secara statistik, peneliti menggunakan analisis uji beda rata-rata (mean difference) pada data hasil penelitian. Berikut ini adalah hasil uji rata-rata yang didapat terkait persepsi terhadap gaya kepemimpinan pada kedua era kepresidenan.

Tabel 4. Uji Beda Rata-rata Persepsi Gaya Kepemimpinan SBY dan JKW

	Paired Samples Statistics		Paired Samples Test	
	Mean	Std. Deviasi	t	Sig.
Gaya Kepemimpinan SBY	21,06	5,339	4,576	0,000
Gaya Kepemimpinan JKW	19,23	6,413		

Sumber: olah data penelitian terhadap 500 responden menggunakan SPSS 22

Berdasarkan nilai signifikansi uji rata-rata yang bernilai 0,000 yang berarti $\leq 0,05$, H1 diterima yang berarti terdapat perbedaan rata-rata persepsi responden terhadap gaya kepemimpinan SBY dan JKW. Hal ini berarti terdapat persepsi mengenai gaya kepemimpinan yang dirasakan lebih baik oleh masyarakat di antara dua era kepemimpinan itu. Jika dilihat dari nilai rata-rata dari jawaban responden penelitian dimana rata-rata jawaban responden penelitian tentang gaya kepemimpinan SBY yang sebesar 21,06 dan JKW yang bernilai 19,23 dapat disimpulkan responden penelitian mempersepsikan gaya kepemimpinan yang lebih demokratis ditunjukkan SBY dibandingkan yang dilakukan oleh JKW.

Selain uji statistik yang dilakukan, berdasarkan uraian tanggapan narasumber dari kalangan akademisi, jurnalis dan politisi terkait opini mereka terhadap gaya kepemimpinan SBY dan JKW terdapat beberapa hal penting yang dapat digarisbawahi pada dua presiden itu. Pertama, opini pada sisi demokratis pada gaya kepemimpinan SBY dan JKW. Salah satu sisi demokratis yang menjadi kelebihan utama dari gaya kepemimpinan JKW adalah tindakan yang turun langsung (blusukan) dan tidak berjarak dengan masyarakat saat dilapangan dibandingkan apa yang dilakukan SBY (Narasumber 1, 5). Namun, secara umum, baik presiden JKW yang dirasa dekat dengan masyarakat sipil, maupun SBY yang berasal dari militer tidak menjadi pembeda bahwa kedua presiden ini masih terbilang demokratis (Narasumber 2, 6).

Selanjutnya dari sudut pandang cara bekerja, JKW dapat dikatakan lebih pragmatis dalam memimpin dibandingkan SBY, khususnya dalam tindakan pembangunan ekonomi (Narasumber 3). Selain itu, dengan background kepemimpinan yang berbeda. SBY yang berlatar belakang militer sedangkan JKW sipil, bekerja dengan kecenderungan menunjukkan sikap keras dan tegas justru terdapat pada karakter gaya kepemimpinan JKW (Narasumber 4).

Selain itu, jika berbicara mengenai siapa yang lebih memiliki karakter demokratis, penilaian gaya kepemimpinan dapat menjadi sangat dilematis, SBY dan JKW adalah contoh untuk membuka perspektif soal kepemimpinan politis di Indonesia. Gaya kepemimpinan presiden di Indonesia khususnya SBY dan JKW penuh dinamika dengan latar belakang yang berbeda, serta dukungan politis yang juga bervariasi (Narasumber 1). Namun, dalam hal penyidikan suatu kasus melalui keterlibatan aparat terhadap para pengkritik pemerintah, seperti SBY dapat dikatakan lebih demokratis dibandingkan JKW (Narasumber 4). Jadi dapat dikatakan, mencari sosok yang demokratis seutuhnya merupakan upaya yang sangat mahal

karena harus memperhatikan masukan semua orang dengan serius lalu baru diambil kesimpulan, dimana hal ini akan sangat susah dilakukan di Indonesia (Narasumber 1).

Kedua, sisi atau tindakan yang dianggap otoriter pada gaya kepemimpinan SBY dan JKW. Dari sisi lainnya, terdapat sikap atau tindakan kedua presiden yang menjadi dilematis jika mengukur gaya kepemimpinan. Pada gaya kepemimpinan JKW misalnya penggunaan dan penekanan aspek aparat keamanan atas nama stabilitas sering dilakukan. Hal ini adalah indikator bagi sebagian orang yang menilai sifat otoriter seorang pemimpin ada pada gaya kepemimpinan JKW (Narasumber 1). Walaupun dibandingkan SBY, JKW yang berasal dari kalangan sipil lebih memiliki sifat egaliter (blusukan ketemu siapa saja), tapi kenyataan banyak orang yang menjadi takut bersuara memberi kritik karena lebih cenderung memilih pendekatan aparat dalam menyelesaikan masalah. Tugas utama yang ada pada gaya kepemimpinan JKW untuk mengurangi kesan otoriter adalah dengan mengurangi tindakan penegakan hukum yang cenderung otoriter (Narasumber 4).

Sementara itu, kepemimpinan SBY juga tidak lepas dari sifat negatif yang dapat saja dikaitkan dengan karakteristik non-demokratis atau otoriter. Seperti contoh berbeda dengan pendekatan yang dilakukan JKW saat berada di tengah masyarakat, gesture SBY dapat dikatakan terlalu elitis dan berjarak dengan masyarakat, artinya saat turun dan berbaur dengan masyarakat seperti gempa bumi di Aceh gaya pendekatannya kaku karena terlalu formal (Narasumber 5).

Selain itu, sikap SBY yang cenderung tidak sekeras JKW dalam menindak suatu kasus tidak lepas dari persepsi negatif terhadap SBY. Ketidaktegasan SBY dalam mengambil sikap pada beberapa kejadian, bukan menjadikan masyarakat melihat sosok SBY sebagai seorang pemimpin demokratis, melainkan sebagai sosok pemimpin militer yang ragu-ragu (Narasumber 1, 3, 6). Namun, sebagian pendapat melihat bahwa, baik presiden JKW yang dirasa dekat dengan masyarakat sipil, dan SBY yang berasal dari militer tidak membuat perbedaan persepsi bahwa salah satu dari mereka bergaya otoriter. (Narasumber 2, 3, 6). Selain itu, jika dilihat dari positif dan negatifnya cara kedua presiden dalam bertindak, SBY dengan kehati-hatian dalam bersikap, membutuhkan waktu yang lebih lama untuk sebuah solusi. Sementara itu, JKW yang cepat karena bersikap pragmatis, dapat membuat kebijakan yang lebih cepat dan tidak populer walaupun akhirnya memberikan dampak multiplier effect, sementara kebijakan tersebut dianggap otoriter oleh sebagian orang (Narasumber 3, 5, 6).

Persepsi Masyarakat Terhadap Praktik Demokrasi Pada Era SBY dan JKW

Berdasarkan hasil jawaban 500 responden, peneliti juga melihat perbandingan persepsi responden mengenai praktik demokrasi yang ditampilkan pada kedua era presiden. Adapun kategori penilaian itu adalah sebagai berikut: Baik, Biasa saja, dan Kurang Baik.

Tabel 5. Persepsi Praktik Demokrasi pada Era SBY dan JKW

Persepsi	SBY		JKW	
	Jumlah	%	Jumlah	%
Kurang Baik	17	3,4	103	20,6
Biasa Saja	268	53,6	249	49,8
Baik	215	43,0	148	29,6

Sumber: olah data penelitian terhadap 500 responden menggunakan SPSS 22

Berdasarkan tabel 5, secara deskriptif tidak terlalu jauh atau tinggi perbedaan persepsi baik/buruknya praktik demokrasi pada dua era kepemimpinan. Pada setiap era SBY dan JKW responden sebagian besar merasa bahwa tidak ada yang spesial (biasa saja) dengan praktik demokrasi SBY (53,6%) dan JKW (49,8%). Namun, persentase responden yang puas dengan praktik demokrasi pada era SBY lebih besar dibandingkan dengan era kepemimpinan JKW. Hal ini terlihat dari besarnya persentase responden yang menilai praktik demokrasi SBY baik dibandingkan persentase penilaian terhadap JKW yaitu 43% berbanding 29,6%. Begitu pun sebaliknya, persentase responden yang menilai kurang baik praktik demokrasi di era SBY jauh

lebih rendah dibandingkan penilaian terhadap demokrasi era JKW yaitu 3,4% berbanding 20,6%.

Untuk melihat perbedaan lebih jauh secara statistik, peneliti menggunakan analisis uji beda rata-rata (mean difference) pada data hasil penelitian. Berikut ini adalah hasil uji rata-rata yang didapat terkait persepsi terhadap praktik demokrasi pada kedua era kepresidenan:

Tabel 6. Uji Beda Rata-rata Praktik Demokrasi Era SBY dan JKW

	Paired Samples Statistics		Paired Samples Test	
	Mean	Std. Deviasi	T	Sig.
Praktik Demokrasi Era SBY	67,49	14,643	7,413	0,000
Praktik Demokrasi Era JKW	58,58	18,009		

Sumber: olah data penelitian terhadap 500 responden menggunakan SPSS 22

Berdasarkan nilai signifikansi uji rata-rata yang bernilai 0,000 yang berarti $\leq 0,05$, H1 diterima yang berarti terdapat perbedaan rata-rata antara persepsi responden terhadap praktik demokrasi era SBY dan JKW. Hal ini berarti terdapat persepsi adanya praktik demokrasi yang lebih baik yang dirasakan masyarakat di antara dua era kepemimpinan itu. Jika dilihat dari nilai rata-rata dari jawaban responden penelitian dimana rata-rata jawaban responden penelitian tentang praktik demokrasi era SBY yang sebesar 67,49 dan era JKW yang bernilai 58,58 dapat disimpulkan responden penelitian mempersepsikan adanya praktik demokrasi yang lebih baik yang dirasakan pada era SBY dibandingkan yang dirasakan pada era JKW.

Berdasarkan uraian pendapat beberapa narasumber dari kalangan akademisi, jurnalis dan politisi terkait opini mereka terhadap praktik demokrasi semasa kepemimpinan SBY dan JKW terdapat beberapa hal penting yang dapat digarisbawahi pada dua presiden itu. Pertama, peran dan keberadaan partai politik pada kedua era. Jika dinilai dari peran partai politik terhadap pemerintah, secara karakteristik peran partai politik relatif tidak ada banyak perubahan baik pada masa SBY dan baik pada masa pak JKW (Narasumber 1, 2, 3, 5, 6). Perbedaan utamanya hanya terletak pada sosok SBY yang mempunyai partai sehingga dapat menggerakkan partainya dalam berbagai aksi politis, sementara JKW dapat dikatakan hanya sebagai petugas partai (Narasumber 3). Selain itu, pada era SBY, partai politik masih menunjukkan fungsinya sebagai penyeimbang, pengawas bagi pemerintah karena peran oposisi yang bersikap kritis terhadap kebijakan pemerintah. Sebaliknya, pada masa kepemimpinan JKW, dirasakan tidak ada yang mengambil sikap oposisi secara tegas (Narasumber 4).

Selain itu, terdapat kesamaan yang dapat dikatakan kurang baik dalam sistem demokrasi, dimana ada beberapa persoalan seperti kelembagaan partai yang masih lemah, aspek ketokohan atau figur partai politik masih sangat kuat dan sentralisasi pengambilan kebijakan partai. Dalam hal ini dapat dikatakan dominasi ketua partai sangat dominan dalam menentukan arah kebijakan sehingga dapat dikatakan demokrasi tidak berjalan baik dari level partai (Narasumber 1, 2). Selain itu, hal negatif juga dirasakan karena Parpol sangatlah pragmatis, sangat mudah berpindah dari satu posisi ke posisi yang lain, terutama di dalam membuat kebijakan di dalam DPR. Jadi dirasa kurangnya ideologi yang menonjol pada parpol. Selain itu, pragmatisme juga terlihat dari tokoh yang dicalonkan, lebih mementingkan orang yang populer (Narasumber 1).

Pada era JKW dimana peran oposisi dapat dikatakan cukup lemah, Politik lebih berorientasi pada cara menjadi bagian dari kekuasaan (Narasumber 1). Namun, jika dikaji kekurangan dan kelebihan dari keberadaan oposisi ini tentu dilihat dari beberapa hal, salah satunya adalah dalam pengambilan kebijakan. Dengan adanya oposisi pengambilan keputusan pada beberapa kebijakan ada yang terhambat karena tidak adanya persetujuan oposisi. Sebaliknya, pada era JKW yang posisinya lemah, kebijakan-kebijakan pemerintah dapat dieksekusi dengan cepat dan lancar. Tapi mengurangi fungsi kontrol dari parpol untuk melindungi kepentingan seluruh lapisan masyarakat (Narasumber 4, 5, 6).

Kedua, adalah penegakan demokrasi dari sisi peran Lembaga non-pemerintah dari sisi LSM/NGO/LBH serta organisasi mahasiswa dan penyiaran. Keberadaan dan peran dari Lembaga non-pemerintah ini dapat dikatakan sangat bergantung bagaimana rezim/pemerintah yang berkuasa saat itu (Narasumber 1, 3, 5, 6). Pada era SBY dan JKW lembaga non pemerintah dapat dikatakan tidak terlalu ada diskriminasi, hanya saja ada perbedaan pada cara menerima dan melakukan proses terhadap laporan pada era JKW lebih baik memproses laporan dibanding era SBY. Jadi perbedaannya terletak pada seberapa serius penindakan yang dilakukan atas laporan (Narasumber 3, 5).

Sebaliknya, narasumber lainnya menyebut bahwa pada era Presiden SBY, aktivitas lembaga non pemerintah seperti yang disebut di atas dapat berjalan dengan bebas tanpa ada tekanan. Dimana Pada era Presiden JKW ada perubahan di dalam kebebasan menyampaikan kritik atau ekspresi terhadap pemerintah. Penerapan aturan hukum lebih rigid dan ketat (Narasumber 4). Keberadaan pihak-pihak ini sangatlah penting karena berperan sama dengan partai oposisi yaitu menyeimbangkan keadaan agar dominasi pemerintah punya batasan (Narasumber 2).

Dari catatan yang ada, pembatasan pada aktivitas Lembaga non-pemerintah ini dapat dikatakan berbeda konteks karena dapat dirasakan dari bentuk perlakuan tiap pemerintahan, tetapi pembatasan yang dilakukan pada dua era ini sifatnya lebih ke incidental yang tidak sistematis (Narasumber 1, 3, 4, 5, 6). Namun, jika dikaji lebih jauh, pada dua era kepresidenan, pembatasan secara langsung tidak pernah diakui oleh pemerintah, tetapi terkadang praktik di lapangan tidak jarang terjadi reaksi atau respon kritik yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Baik pada era SBY maupun era JKW situasi seperti ini pernah terjadi. Memang pada era JKW ada perkembangan hate speech yang berkaitan dengan kemajuan teknologi informasi sehingga cepat viral dan boleh jadi penyampaian pendapat berbeda di perioda ini (Narasumber 1, 3, 4).

Ketiga, adalah pembatasan lembaga non-pemerintah dari kebijakan pemerintah SBY dan JKW. Pembatasan bagi Lembaga non-pemerintah yang dianggap “merusak” pada era setiap presiden dapat dilihat dari kebijakan setiap presiden, jika dilihat dari sudut pandang ini presiden JKW tertinggal jauh dari pemerintah SBY dalam penerapan pemerintahan yang konstitusional dalam hal pembatasan ini (Narasumber 2). Sebagai contoh sebagai kebijakan yang membatasi Lembaga non-pemerintah adalah kebijakan dari pemerintah JKW yang mengubah konstitusi UU ormas. UU ormas yang lama No 7 Tahun 2013 memang menyebutkan pembatasan ormas sepanjang ditentukan oleh peradilan atau sanksi lain secara demokratis. Akan tetapi, UU ormas tersebut diubah melalui Peraturan Pemerintah pengganti UU nomor 2 tahun 2017 (setelah dikonfirmasi oleh DPR, menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019) sehingga pembatasan ormas tidak perlu lagi mempertimbangkan proses konstitusional lewat peradilan. Dengan demikian pada era JKW, Ormas dapat dibubarkan atas persetujuan langsung pemerintah (Narasumber 2).

Namun, dari semua kebijakan yang pernah diambil, baik era SBY dan JKW ada situasi dimana LSM atau NGO dirangkul dengan baik, contohnya pada zaman SBY merangkul teman teman di isu Human right seperti Rachland Nashidik. Sementara itu, JKW merangkul mantan direktur ICW Teten Masduki. Ini penting dilakukan untuk mengakomodasi kelompok di luar pemerintahan agar kemudian tidak dianggap tersentralisasi (Narasumber 1, 6). Dapat dikatakan hubungan kedua pemerintahan dengan lembaga-lembaga itu tidak ada masalah secara umum. Namun, pemerintahan JKW dapat dikatakan mengupayakan agar seirama dengan LSM atau NGO (Narasumber 3, 4, 5, 6).

Keempat, adalah kinerja dan peran birokrasi pemerintah SBY dan JKW. Jika dilihat perbandingan dalam hal birokrasi baik pemerintahan SBY dan JKW dirasakan tidak terlalu banyak perubahan. Hal yang mungkin sedikit pembeda adalah sistem manajemen pelayanan yang sekarang lebih terbuka. Kedua dua presiden memiliki masalah di dalam mengambil aspek ketatanegaraan (Narasumber 1, 2, 6). Namun, dari beberapa indikator, pemerintahan JKW dapat disebut lebih unggul dibandingkan SBY. JKW lebih mengedepankan perubahan dengan memangkas proses birokrasi melalui perubahan regulasi agar kinerja pemerintahan jadi cepat. Berbeda dengan SBY yang cenderung tidak mengubah sistem karena

pertimbangan mengubah sistem dapat mengganggu stabilitas dari kinerja dari kementerian. Selain itu, faktor teknologi yang sudah lebih bagus, mempermudah birokrasi (Narasumber 2, 3, 4, 5).

Walaupun kelebihan birokrasi pada era JKW adalah kecepatan birokrasi, tetapi terkadang tidak berjalan mulus karena tidak diikuti dengan pengetahuan dari SDMnya. Pada era JKW birokrasi disederhanakan untuk meningkatkan pelaporan dan pengendalian. Sementara itu, kelemahan pada era SBY itu adalah memberikan ruangan kepada kementerian masing-masing untuk melakukan tindakan sehingga tidak jarang kementerian punya agenda masing-masing (Narasumber 3, 5). Pada masa pemerintahan JKW, banyak bermunculan tokoh muda dengan pikiran modern yang mengerti cara memanfaatkan teknologi, pemerintahan yang tidak hanya berfokus pada pusat tapi juga di daerah. Hal ini tidak dimiliki era SBY, yang menjadi penghambat reformasi birokrasi pada era SBY (Narasumber 4).

Kelima, adalah penilaian bagaimana praktik penegakan peradilan independen pada kedua era. Jika menilai perbandingan praktik peradilan di antara pemerintahan SBY dan JKW, dapat dikatakan tidak banyak berubah dalam artian lebih luas. Sebagai contoh, apa yang terjadi di MA tidak banyak berubah secara prinsip (Narasumber 2, 4, 5, 6). Walaupun peradilan independen pada kedua era dapat dikatakan sama saja, perbedaan penting dalam konteks peradilan lebih kepada faktor masyarakat pada era JKW dimana masyarakat yang sudah semakin melek hukum (Narasumber 3, 6).

Selanjutnya dari faktor ada tidaknya intervensi dalam peradilan, kedua era seperti tidak ada intervensi, kecuali masih terdapat pemberian grasi dan remisi (Narasumber 3, 5). Namun, perbedaan menarik dari sisi minor, pada pemerintahan JKW ada presiden baru yang tidak ada pada era SBY yaitu praperadilan yang sangat menarik dibahas; lewat prapadialan keputusan seperti dari KPK dapat dimentahkan (Narasumber 5, 6). Namun, hal terpenting dari kedua era terkait penegakan peradilan adalah belum terwujudnya peradilan yang bersih. Peradilan yang belum bersih ini mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat pada proses hukum. Selama komponen-komponen dalam peradilan belum bersih, keadilan bagi seluruh warga negara Indonesia masih sukar terwujud (Narasumber 4, 6).

Keenam, perbandingan praktik kebebasan sipil dan politis. Dari faktor kebebasan sipil dan politis dapat dikatakan pemerintahan SBY berkesan hati-hati dalam hal kebebasan sipil dan politis. Dibandingkan JKW, SBY lebih memberi ruang yang luas atau memfasilitasi keleluasaan pada orang yang mengkritik dia dan pemerintahannya. Sebaliknya, JKW dalam menangani banyak kritik dengan kecenderungan mengedepankan aparat keamanan (Narasumber 1). Pada era JKW banyak yang bilang "represif", tetapi bukan berarti represif sebenarnya. Relatif represif bila dibandingkan dengan era SBY, yaitu masa transisi dimana SBY berusaha merangkul semua pihak jadi berkesan lebih bebas (Narasumber 3).

Perbedaan lainnya tentang kebebasan sipil pada era SBY adalah seringnya pemerintahan yang dipimpinnya mengubah regulasi tentang kebebasan sipil yang dianggap cukup penting pada masa itu, sementara JKW Perpunya cuma berapa kali tetapi menjadi sorotan seperti Perppu Ormas (Narasumber 3). Sementara itu, dari indikator kebebasan sipil secara umum, masing-masing menghadapi tantangan yang berbeda dalam kebebasan berpendapat, terlepas dari kondisi di luar pemerintahan seperti perkembangan media sosial (Narasumber 4), penguasa kebijakan memiliki pendekatan berbeda dalam menghadapi orang yang "vokal" terhadap pemerintah (Narasumber 4). Selain itu, catatan penting dalam kebebasan sipil pada dua era adalah ketersediaan landasan hukum yang jelas dalam berpendapat. Sampai saat ini belum diatur dengan jelas dan hukum berkesan memiliki pasal "karet", karena kebebasan berpendapat dibatasi hak orang lain (Narasumber 4).

Dalam kebebasan politik, kedua pemerintah sebenarnya memberikan kebebasan pada warganya untuk berpolitik. Perbedaannya terletak pada keberadaan dan fungsi oposisi. Selain itu, polarisasi dalam masyarakat menimbulkan kesan bahwa terjadi perbedaan kebebasan politik pada kedua era (Narasumber 4, 6). Lalu, hal menarik dari kebebasan politik terletak pada politik identitas yang sangat kuat pada era JKW. Inilah kebebasan sipil dan politis yang menjadi masalah utama di media sosial saat ini (Narasumber 5).

Ketujuh, perbandingan indikator kebebasan politik dan sipil di dari sisi kebebasan pers. Peran pers dan situasi pemberitaan pada kedua era sangat berbeda dan terlihat dari kelompok media dari beberapa stasiun tv yang menunjukkan keberpihakan pada pemerintah JKW. Berbeda sekali dengan SBY yang mungkin saja tetap ada yang mendukung tapi tidak secara eksplisit (Narasumber 1, 2, 6). Sementara itu, pendapat lain menunjukkan kebebasan pers di antara JKW dan SBY. Isu mengenai pers ini, adalah pada masa JKW dapat dikatakan sebagai "limbahan" dari masa SBY yang tidak selesai. Contohnya permasalahan tentang kritik kebebasan berekspresi di media karena UU ITE yang sangat menggema saat era JKW, padahal sudah mulai dirancang dari era SBY kalau tidak salah (Narasumber 3).

Namun, secara keseluruhan, kebebasan pers pada kedua era sudah lebih baik dari era sebelumnya, saat ini sudah tidak ada lagi insiden pemimpin redaksi diintervensi oleh seseorang dari jajaran pemerintah. Selain itu, keterbukaan informasi pada era internet sudah semakin masuk ke dalam kehidupan masyarakat, jadi semua informasi jadi lebih bebas (Narasumber 3). Media yang kritis juga tetap ada, positifnya adalah media yang kritis ini tidak mendapat pembatasan atau dibredel sebagaimana lazim terjadi pada zaman Soeharto (Narasumber 1, 2, 6).

Tantangan independensi pers dalam memihak kebenaran sangat besar dalam era pemerintahan JKW. Peran pers terdistorsi dengan kehadiran media sosial yang seolah-olah memberitakan fakta. Intervensi media lewat redaksi pada zaman JKW lebih terasa, media jadi lebih terasa perbedaannya yaitu berpihak dan menentang (Narasumber 4). Salah satu tantangan yang terbesar adalah kebebasan yang dimanfaatkan untuk penyebaran fitnah, berita palsu atau bohong (hoax) termasuk adanya buzzer. Tantangan semacam ini tidak dihadapi oleh SBY (Narasumber 1).

Kedelapan, perbandingan partisipasi politik pada kedua era yang menjadi indikator antusiasme masyarakat terhadap politik di Indonesia. Di kedua era sebenarnya partisipasi politiknya dapat dikatakan sama karena sudah sama-sama menggunakan hak pilih langsung oleh rakyat dan dapat dikatakan sangat baik. Perbedaan Pada era JKW lebih kompleks karena persaingan pemilihan sudah tidak ada lagi pengaruh militer, karena yang dicari masyarakat pada saat itu adalah sosok pemimpin yang dapat mengayomi, sementara partisipasi saat SBY terbantu karena diidamkannya sosok yang tegas (Narasumber 3, 4, 5). Selain itu, partisipasi politis dalam hal keikutsertaan memilih saat ini sangat dipengaruhi oleh politik identitas, yaitu agama, suku atau ras tertentu. Pada SBY juga sudah terjadi, tapi tidak semasih saat ini (Narasumber 1).

Perbedaan partisipasi politis bukan lebih bergantung pada kondisi rezim pada suatu era, tetapi pada faktor masyarakat dimana terkoneksi ruang digital dan ruang publik. Dunia online dan offline dapat tersambung, social media sangat kuat jadi secara langsung menjadikan partisipasi masyarakat jadi lebih tinggi (Narasumber 1).

Jika dilihat dari penyelenggaraan pemilu, kebebasan politis dapat dikatakan cukup baik, tapi masih terkekang oleh peraturan-peraturan yang membuat berpikir dua kali untuk mungkin atau tidak ikut bertarung dalam pemilu, jangankan berpikir menang pemilu, terkadang ikut terlibat menjadi calon dalam pemilu masih tergolong susah (Narasumber 6). Namun, dalam indikator ini, masih ada masalah serius yaitu masalah konstitusional (ranah MK) karena tidak konsistennya hak memilih dan dipilih dari segi usia pada diri seorang warga negara. Di Indonesia, hak memilih didapat saat usia 17 tahun, hak dipilih pada usia 21 tahun dan menjadi pemimpin setingkat walikota hanya dapat dilakukan saat berusia 25 tahun, ini seharusnya menjadi catatan kedepannya (Narasumber 6).

Pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap Kondisi Ideal Praktik Demokrasi

Selanjutnya, uji pengaruh dilakukan melalui analisis regresi dengan melihat hubungan antara variabel gaya kepemimpinan dengan persepsi terhadap demokrasi melalui variabel kebijakan publik. Berikut adalah hasil uji hipotesis pengaruh antara variabel yang didapat.

Tabel 7 Hasil Uji Regresi Pengaruh Antar Variabel

Model	Coefficients		R2	Kesimpulan
	t	Sig. (α)		
(Constant)	7,456	0,000	0,510	H1 Diterima
Gaya Kepemimpinan X Kebijakan Publik	3,179	0,002		

Dependent Variable: Persepsi mengenai Demokrasi

Sumber: olah data penelitian terhadap 500 responden menggunakan SPSS 22

Berdasarkan tabel 7, didapatkan hasil hitung sebesar 3,179 dan signifikansi 0,002. Dengan $df = 200$ didapatkan nilai t tabel sebesar 1,65251, jadi nilai $3,179 > 1,65251$ dan $0,002 < 0,05$ (t hitung $\geq t$ tabel dan α (sig.) $\leq 0,05$). Maka, dapat disimpulkan menerima H1, yang berarti terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara gaya kepemimpinan terhadap persepsi terkait demokrasi melalui kebijakan publik sebagai moderasi. Hal ini berarti bahwa semakin baik atau positif gaya kepemimpinan akan semakin baik pengaruhnya ketika dimoderasi oleh kebijakan publik yang ditujukan seorang presiden akan semakin baik pembentukan persepsi masyarakat terkait persepsi praktik demokrasi pada masa kepemimpinan presiden itu.

Dengan koefisien determinasi yang bernilai lebih tinggi 0,510 berarti terdapat 51% perubahan varians dari variabel persepsi terhadap praktik demokrasi yang mampu dijelaskan oleh variabel gaya kepemimpinan dengan kebijakan publik sebagai variabel moderasi secara terpisah. Nilai koefisien determinasi yang lebih besar ini menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan dan persepsi kebijakan publik seorang presiden pada suatu era kepemimpinan dapat memperkuat persepsi baik tidaknya praktik demokrasi di negara itu. Jadi semakin demokratis gaya kepemimpinan seorang presiden dan positifnya kebijakan publik yang diterapkan akan semakin tinggi pula persepsi berjalannya demokratisasi pada negara yang dia pimpin. Begitu pun sebaliknya, semakin otoriter seorang pemimpin dan kebijakan publik yang jauh dari prinsip demokrasi akan semakin jauh sebuah negara yang dipimpinnya dari praktik demokrasi.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan analisis yang dipaparkan pada bab sebelumnya, terdapat beberapa kesimpulan yang didapat untuk mencapai tujuan penelitian ini. Pertama, hasil survei pada 500 responden dan wawancara terhadap beberapa narasumber didapat kesimpulan adanya perbedaan persepsi masyarakat mengenai kebijakan publik pada era tertentu, dalam hal ini antara era kepemimpinan SBY dan JKW. Berdasarkan uji beda rata-rata yang dilakukan, responden mempersepsikan kebijakan publik pada era kepemimpinan SBY lebih baik jika dibandingkan dengan kebijakan publik yang dirasakan pada era kepemimpinan JKW.

Temuan kedua adalah adanya perbedaan persepsi masyarakat mengenai nilai gaya kepemimpinan yang dijalankan SBY dan JKW selama menjabat sebagai presiden. Berdasarkan uji beda rata-rata yang dilakukan, responden mempersepsikan gaya kepemimpinan SBY memiliki rata-rata penilaian yang lebih baik dalam mendorong demokrasi jika dibandingkan dengan gaya kepemimpinan yang dipersepsikan masyarakat mengenai presiden JKW.

Temuan berikutnya atau ketiga menunjukkan hubungan yang positif dan signifikan antara gaya kepemimpinan dan persepsi terkait demokrasi. Hal ini berarti bahwa semakin baik atau positif gaya kepemimpinan yang ditujukan seorang presiden akan semakin baik pula pembentukan persepsi masyarakat terkait persepsi praktik demokrasi pada masa kepemimpinan presiden itu.

Selain itu uji regresi juga dilakukan dengan menambahkan variabel kebijakan publik sebagai variabel kontrol. Hasil uji regresi yang didapat juga menunjukkan terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara gaya kepemimpinan dan persepsi mengenai demokrasi melalui kebijakan publik sebagai moderasi. Dengan semakin baik atau positif gaya kepemimpinan yang ditambah atau dengan baiknya kebijakan publik yang dibuat atau diterapkan seorang presiden membuat pembentukan persepsi masyarakat mengenai praktik

demokrasi pada masa kepemimpinan presiden itu menjadi semakin baik. Jika merujuk pada perbedaan nilai rata-rata memang terlihat adanya perbedaan yang menunjukkan nilai rata-rata praktik demokrasi pada era SBY agak lebih tinggi dibandingkan era JKW. Hal ini menguatkan hasil hipotesis terkait pengaruh persepsi demokrasi yang dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan dan kebijakan publik: pada uji yang dilakukan sebelumnya menunjukkan bahwa baik nilai rata-rata gaya kepemimpinan dan kebijakan publik pada era SBY juga lebih tinggi dibandingkan pada era JKW. Ini sekaligus menolak stigma atau anggapan umum bahwa kepemimpinan berlatar belakang militer akan lebih otoriter dibanding yang berlatar belakang sipil.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2008). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Dahl, R. A. (1982). *Dilemmas Of Pluralist Democracy: Autonomy vs Control*. London: Yale University Press.
- Diamond, L. (1999). *Developing Democracy : Toward Consolidation*. Baltimore: John Hopkins University Press.
- Dunn, W. N. (2000). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Esposito, J. L., Sonn, T., & Voll, J. O. (2016). *Islam and Democracy after the Arab Spring*. Oxford: Oxford University Press.
- Fukuyama, F. (1992). *The End of History and The Last Man*. New York: Free Press.
- Giddens, A. (1999). *The Third Way The Renewal of Social Democracy*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama .
- Gunawan, W. (2015). *Menilik Demokrasi*. Yogyakarta: Tanah Air Beta.
- IDI. (2017). *Citra Demokrasi, Minim Kapasitas*. Jakarta: Indeks Demokrasi Indonesia.
- Narasumber1. (2021, Juni 20). *Akademisi - Persepsi Masyarakat Mengenai Perkembangan Demokrasi Semasa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Dan Joko Widodo Di Indonesia*. (A. Hanna, Pewawancara)
- Narasumber2. (2021, Juni 24). *Akademisi - Persepsi Masyarakat Mengenai Perkembangan Demokrasi Semasa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Dan Joko Widodo Di Indonesia*. (A. Hanna, Pewawancara)
- Narasumber3. (2021, Juli 03). *Jurnalis - Persepsi Masyarakat Mengenai Perkembangan Demokrasi Semasa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Dan Joko Widodo Di Indonesia*. (A. Hanna, Pewawancara)
- Narasumber4. (2021, Juli 5). *Jurnalis - Persepsi Masyarakat Mengenai Perkembangan Demokrasi Semasa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Dan Joko Widodo Di Indonesia*. (A. Hanna, Pewawancara)
- Narasumber5. (2021, Juli 7). *Politisi/Anggota Partai Politik - Persepsi Masyarakat Mengenai Perkembangan Demokrasi Semasa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Dan Joko Widodo Di Indonesia*. (A. Hanna, Pewawancara)
- Narasumber6. (2021, Juli 10). *Politisi/Anggota Partai Politik - Persepsi Masyarakat Mengenai Perkembangan Demokrasi Semasa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Dan Joko Widodo Di Indonesia*. (A. Hanna, Pewawancara)
- Neuman, W. (2014). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches Seventh Edition*. Assex: Pearson Education Limited.
- Rauf, M. (2016). *Perilaku Memilih Dalam Pemilihan Umum Legislatif 2004 Pada Era Pasca Reformasi di Provinsi Jawa Barat*. Universitas Indonesia: Disertasi: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- Salim, A. (2006). *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Tiara.
- Sartori, G. (1962). *Democratic Theory*. Detroit: Wayne University Press.
- Sorensen, G. (2003). *Demokrasi dan Demokratisasi (Proses dan Prospek dalam Sebuah Dunia yang Sedang Berubah)*, dialihbahasakan oleh I. Made Krisna. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Thoha, M. (2013). *Kepemimpinan dalam Manajemen*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Wahjosumidjo. (1994). *Kepemimpinan dan Motivasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Winarno. (2010). *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*. Surakarta: Bumi Aksara., h: 91.
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus . Yogyakarta: Buku Seru*.